

## MEMBACA MODEL DEMOKRASI DI INDONESIA SAAT INI MELALUI KONSEP KONTRAK SOSIAL JJ ROUSSEAU

Yoakim Ano Grevi<sup>1</sup>, Paskalis Ronal Purnama<sup>2</sup>  
[yoakimgrevi@gmail.com](mailto:yoakimgrevi@gmail.com)<sup>1</sup>, [onallpaschal@gmail.com](mailto:onallpaschal@gmail.com)<sup>2</sup>  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

### ABSTRAK

Demokrasi adalah peluang bagi setiap orang untuk mengakses kebebasan demi tercapainya segala kebutuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, masalah demokrasi selalu menjadi persoalan yang marak terjadi dalam hidup manusia. Masalah ini sulit ditumpas karena keserakahannya yang tertanam dalam diri manusia terutama para elite politik. Hal ini membutuhkan refleksi yang mendalam dari setiap anggota komunitas atau negara agar membuka peluang bagi kemajuan suatu negara. Dalam tulisan ini, metode yang dilakukan penulis ialah melakukan kajian pustaka. Data-data yang dipakai oleh penulis adalah data-data ilmiah dari berbagai sumber. Penelitian yang dilakukan penulis melewati lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber-sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Berbicara tentang demokrasi berarti berbicara juga soal Kontrak Sosial yang dicetuskan Rousseau. Kontrak Sosial sebagai suatu perjanjian antara pemimpin maupun antara sesama individu dalam negara. Perjanjian ini berupa aturan atau hukum yang ditetapkan dalam suatu negara. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sepihak atau menciptakan undang-undang yang merugikan rakyat. Namun yang terjadi adalah Kontrak Sosial yang dikonsepsikan oleh Rousseau tidak begitu optimal diterapkan di Indonesia. Kini negara Indonesia terbelenggu oleh kepentingan sepihak. Hak-hak rakyat kini dibatasi. Konsep hidup bersama hanya sebuah slogan yang memberi jalan bagi para koruptor untuk beraksi. Demokrasi seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Selain itu, Demokrasi harus mampu membawa perubahan dari segi kehidupannya sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sistem demokrasi yang efektif seharusnya juga mendorong inklusivitas dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok yang terpinggirkan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Indonesia, Kontrak Sosial.

### ABSTRACT

*Democracy is an opportunity for everyone to access freedom to achieve their needs. In today's modern world, the issue of democracy has always been a rampant problem in human life. This problem is difficult to eradicate because of the greed that is embedded in humans, especially the political elites. This requires deep reflection from every member of a community or country in order to open up opportunities for the progress of a country. In this paper, the method used by the author is to conduct a literature review. The data used by the author is scientific data from various sources. The research conducted by the author goes through five stages, namely topic selection, collection of sources, verification, interpretation, and writing. Talking about democracy means also talking about the Social Contract initiated by Rousseau. Social Contract as an agreement between leaders and between individuals in the state. This agreement is in the form of rules or laws established in a country. The government cannot make unilateral decisions or create laws that harm the people. But what happened was that the Social Contract conceptualized by Rousseau was not optimally applied in Indonesia. Now the Indonesian state is shackled by unilateral interests. The rights of the people are now restricted. The concept of living together is just a slogan that gives way for corruptors to act. Democracy should be a sistem of government that adheres to the principles of freedom, justice and popular participation. In addition, democracy should be able to bring changes in terms of social, economic, political and other aspects of life. An effective democratic sistem should also encourage inclusiveness and active participation from various groups in society, including minorities and marginalized groups.*

**Keywords:** Democracy, Indonesia, Social Contract.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu keinginan terbesar manusia ialah ingin terlepas dari segala keterikatan duniawi dan ingin menikmati kebebasan atau biasa disebut kehendak bebas. Memang secara kodrati manusia sebagai makhluk yang bebas, ia memiliki akal budi dan itulah membedakannya dengan makhluk yang lain; manusia mempunyai hak untuk menentukan hidupnya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan secara umum dan inilah hal yang paling fundamental bagi manusia. Namun pada satu sisi, ketergantungan seorang manusia terhadap sesamanya menyebabkan keharusan baginya untuk taat terhadap suatu aturan, contohnya aturan dalam komunitas. Zaman sekarang, manusia selalu berhadapan dengan sistem politik dan demokrasi yang mengayunkan model kehidupan masyarakat. Persoalan politis tidak termasuk dalam dimensi kekuatan karena ia adalah bertumpuh pada fisik, yang tidak korelasi aspek hukum. Berbicara tentang demokrasi, hal tidak bisa dipungkiri ialah tentang ukuran tingkat kemajuan suatu negara, dalam arti bahwa negara dinilai dari sistem demokrasi yang sedang berlansung. Menurut IDEA atau Institute for Democracy and Electoral Assistance, ada beberapa hal utama dalam menilai demokrasi, yaitu berupa:

1. Peran suatu negara dalam memerangi masalah hak asasi manusia.
2. Model tata pemerintahan dalam arti, seberapa besar peran negara dalam menjalankan aturan hukum.
3. Model demokrasi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga pemerintahan.
4. Melihat kondisi ekonomi.

Demokrasi adalah landasan bagi kehidupan sosial yang damai, karena melalui partisipasi dalam berbagai bentuk pemerintahan, manusia mampu hidup bersama dalam harmoni. Ada seorang tokoh yang diangkat penulis dalam tulisan ini, yaitu Jean Jarques Rousseau. Beliau adalah seorang filsuf terkenal abad modern yang memperkenalkan beberapa teori terkenal salah satunya ialah Kontrak Sosial. Konsep ini memperkenalkan suatu model demokrasi seperti di Indonesia yang didasarkan atas persetujuan bebas dari rakyat. Dalam kaitannya, masyarakat memiliki kebebasan dalam meningkatkan ekonomi dalam suatu pemerintahan serta menciptakan politik yang bersih dengan ikut berpartisipasi. Oleh sebab itu, keputusan yang ditetapkan bersama dapat meningkatkan suatu model demokrasi yang lebih baik bagi suatu bangsa. Teori Kontrak Sosial dinilai sebagai bentuk implementasi pemerintahan yang ditetapkan atas kebebasan umum dan partisipasi aktif masyarakat. Konsep Kontrak Sosial sendiri dimengerti sebagai suatu perjanjian antara dua pihak dalam menyepakati suatu hal. Dengan memahami konsep kebebasan, partisipasi masyarakat, dan teori Kontrak Sosial, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini berdampak pada praktik demokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya metode penelitian menjelaskan tentang cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam tulisan ini, metode yang dilakukan penulis ialah melakukan kajian pustaka. Data-data yang dipakai oleh penulis adalah data-data ilmiah dari berbagai sumber. Penelitian yang dilakukan penulis melewati lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber-sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Penulis berusaha mengkaji ulang teori-teori sebelumnya. Selama bulan Maret, penulis membaca berbagai jurnal nasional dan internasional untuk mendapatkan data yang relevan. Analisis data dilakukan setelah penulis menyelesaikan kajian data pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perspektif Teori Kontrak Sosial Rousseau

Teori Kontrak Sosial sebenarnya telah jauh dibahas sebelum Rousseau, yaitu oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Thomas Hobbes Kontrak berarti kesepakatan sejumlah orang yang hidup bersama di dalam lembaga berdaulat yang memegang otoritas untuk menyelesaikan masalah keadaan alamiah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat dan mampu mengantar mereka kepada kesejahteraan. Berbeda dengan pandangan John Locke. Inti ajaran Kontrak Sosial Locke adalah individu harus melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Individu adalah kertas putih tanpa noda dan kehidupan individu yang keras menuntut ia untuk menjalin suatu keterikatan dengan komunitas politik. Pemerintah atau komunitas politik itu dibentuk atas persetujuan rakyat sehingga semestinya bisa membantu rakyat. Hak asasi manusia adalah bagian terpenting dari teori Kontrak Sosial John Locke karena menekankan asas kemanusiaan dan sebagai jaminan bagi setiap orang. Kontrak Sosial mesti menjadi pelindung bagi hak-hak individu. Kedua filsuf besar ini sama-sama memberikan pengaruh besar pada masanya. Demikian pula dengan Jean Jarques Rousseau. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas lebih jauh tentang teori Kontrak Sosial Rousseau.

Rousseau lahir di Genewa pada 28 Juni 1712. Pemikirannya sebagai seorang filsuf abad modern sangat jenius dan semenjak ia telah menulis buku-bukunya yang terkenal, seperti, *Emile* (1762), *The Social Contract* (1762) *Confessions* (1770), *Discourse on the Origin of Inequality* (1755). Pengalaman hidupnya sungguh luar biasa sehingga melahirkan ide-ide yang cemerlang pada masa itu. Hidupnya mulai berubah ketika mendapat suatu penghargaan dari akademi Dijon. Ia meraih juara satu dalam lomba menulis esai tersebut tentang apakah seni dan ilmu pengetahuan punya pengaruh bagi manusia. Ia melewati banyak rintangan selama hidupnya dan berhubungan dengan banyak Wanita. Rousseau meninggal pada 2 Juli 1778 di Ermenonville.

#### 1. Kontrak Sosial

Rousseau pernah menulis teori Kontrak Sosial dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract*. Teori ini memiliki korelasi dengan ilmu politik modern sebagai fondasi terbentuknya suatu negara. Contoh-contoh konkretnya ialah pembentukan pemerintahan, perlindungan hak-hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dan menciptakan negara yang adil dan Sejahtera. Ada perbedaan dengan pandangan Hobbes terkait teori kontrak Rousseau. Jika pandangan Hobbes bahwa keberhasilan melalui pemaksaan dapat menciptakan suatu tatanan yang politis; berbeda dengan Rousseau. Menurut filsuf Prancis ini, paksaan tidak mempunyai nilai moral sejati, ia juga tidak percaya dengan akan adanya hak kodrati. Teori Kontrak Sosial Rousseau bertujuan memberi pengaruh. Ada suatu anggapan bahwa individu harus melimpahkan haknya kepada suatu negara sebagai satu kesatuan. Manusia dituntut untuk hidup bersama dalam suatu negara. Kontrak Sosial adalah konsep filosofis politik yang mengatur hubungan individu dan komunitas. Kesepakatan antara individu melahirkan suatu negara sehingga posisi individu sebagai subjek dan suatu komunitas adalah hasil kreatifitas. Kesepakatan ini dihasilkan oleh sekelompok orang yang membentuk satu kesatuan. Persoalannya ialah apabila kekuatan kekuatan serta kebebasan setiap manusia merupakan alat utama bagi penjagaan dirinya, bagaimanakah mungkin ia dapat menggunakannya tanpa membahayakan dirinya sendiri dan tanpa mengabaikan pentingnya melindungi dirinya? Hal inilah yang menjadi topik bahasan dalam teori Kontrak Sosial.

Jika teori Kontrak Sosial dipahami secara baik, maka akan dijumpai suatu kalimat yang berbunyi, “jumlah pemindahan dari setiap anggota asosiasi beserta semua haknya

kepada komunitas karena setiap individu memberikan diri sepenuhnya hingga kondisi tiap pribadi sama.” Proses pemindahan yang dibuat semestinya tidak melibatkan cadangan apapun. Dalam Kontrak Sosial, tidak ada lagi yang namanya individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian suatu komunitas menjadi kepentingan bersama yang diprioritaskan. Apabila hak yang dimiliki setiap orang itu tidak dinikmati bersama, maka besar kemungkinan untuk kembali seperti awal mula sehingga memberi ruang untuk menimbulkan suatu kehancuran. Jika ada seorang anggota komunitas tidak memiliki hak yang sama seperti yang lain, sementara ia sudah memberikan haknya dalam komunitas, maka ia akan menerima suatu yang sepadan dengan pemberiannya. Rousseau sangat mengutamakan kepentingan bersama dalam suatu komunitas dan betapa pentingnya wewenang pemimpin agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan efektivitas konsep “Kontrak Sosial”, seperti KKN, polaritas Masyarakat, kebijakan yang tidak efektif dan lain sebagainya. Beberapa persoalan ini menjadi sumber menurunnya sistem demokrasi yang tidak hanya menimbulkan suatu kerugian bagi Masyarakat, tetapi juga kekacauan dalam ranah pemerintahan dan berujung pada merosotnya sistem demokrasi. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden kemarin, banyak isu negatif yang beredar tentang demokrasi Indonesia yang mulai menurun. Apakah persoalan ini sebagai awal terbentuknya suatu sistem demokrasi yang baru dan berkurangnya ruang kebebasan public yang membatasi ruang masyarakat dalam pengambilan kebijakan? Jika hal ini akan terjadi, maka akan ada suatu krisis besar-besaran dalam negara yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, ada sebuah kesimpulan berupa tidak adanya keadilan sebagaimana yang diidealkan Rousseau dalam teorinya tentang Kontrak Sosial. Dalam suatu negara perlu adanya Kontrak Sosial antara pemerintah dan rakyat agar mencapai kesejahteraan dengan saling menghargai dan memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara. Suatu negara dengan demokrasi yang buruk akan meningkatkan ketimpangan sosial dan keadilan yang tidak merata bagi rakyat terutama kebutuhan yang semestinya diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi institusi pemerintahan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme para pejuang demokrasi untuk mendorong model demokrasi yang lebih efektif dan partisipatif.

## 2. Hubungan Kontrak Sosial dan Demokrasi

Ada sebuah filosofi modern yang mengatakan bahwa, Kontrak Sosial adalah mekanisme untuk membentuk negara dan mengatur hubungan antara individu dan negara. Apa yang dibahas Rousseau mengenai kehendak umum maupun konsep kedaulatan rakyat merupakan hal yang mendasar dalam membahas demokrasi. Rousseau adalah seorang yang mendukung demokrasi karena ia mendukung kedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa demokrasi harus bersifat langsung, di mana rakyat menjadi legislator tanpa perantara perwakilan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Kontrak Sosial membantu mengatur hubungan antara individu dan negara sehingga menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial, yang jika diatur dengan baik akan mempertahankan kebebasan sipil. Kontrak Sosial memiliki korelasi dengan model demokrasi karena sama-sama berjuang untuk kebebasan rakyat. Kontrak Sosial adalah inti dari demokrasi karena menentukan isu-isu yang harus ditangani oleh para pengambil keputusan. Jika adanya ketentuan antara individu dan negara yang tidak sah, maka kemungkinan besar terjadinya penyimpangan. Contoh kecilnya ialah apabila suatu negara yang menerapkan sistem kontrak sosial mengeluarkan undang-undang melarang kritik terhadap pemerintah, maka hal ini disebut penyimpangan. Akibatnya, prinsip-prinsip demokrasi menyimpang dari tujuannya. Sebab itulah mengapa penting bagi

negara-negara demokrasi untuk terus memperbaharui Kontrak Sosial.

## **B. Analisis Model Demokrasi Di Indonesia Saat Ini**

Demokrasi merupakan bagian dari kehidupan politik dan salah satu aspek dari sistem politik di Indonesia. Berbicara mengenai demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia. Demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang dinamik dan integralistik. Ada jejak perjuangan bangsa dalam demokrasi Indonesia. Sifat lain dari demokrasi ialah melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Model demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ada tiga tahap dalam membangun demokrasi di Indonesia, yaitu:

Fase pertama : dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat.

Fase kedua : dari pemerintah Bersama rakyat, oleh pemerintah Bersama rakyat, untuk rakyat

Fase ketiga : dari Rakyat yang didukung Pemerintah, oleh Rakyat yang didukung Pemerintah, untuk Rakyat.

Berbicara tentang demokrasi, terhitung sejak era reformasi ada hal yang masih perlu dibenahi terkait proses demokratisasi. Dari sekian masalah yang ada, terdapat beberapa factor utama yang menyebabkan melemahnya sistem demokrasi di Indonesia, yaitu Korupsi, penegakan hukum tidak mengalami kemajuan, macetnya regenerasi dan pembangunan kesadaran, ancaman kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi. Selain itu, perselingkuhan antarpenguasa melahirkan oligarki dan menciptakan fenomena kolusi dan nepotisme yang berujung pada rakyat sebagai pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya. Beberapa persoalan ini masih melekat dalam proses pembangunan yang semakin menurun.

Dengan demikian, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam era Presiden Jokowi sekarang, ada banyak hal yang mengalami kemunduran serius. Kebijakan yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan agenda pembangunannya mendapat banyak kritik dari masyarakatnya karena ia mengutamakan pembangunan. Jokowi juga mendengarkan pandangan kroni-kroninya dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibandingkan pandangan lawan politik. Dari sinilah awal terjadinya kemunduran demokrasi. Pertaruhan puncak bagi demokratisasi di Indonesia terletak pada Pemilu 2024. Tujuan utamanya ialah perpanjangan kekuasaan politik melalui pencalonan anaknya (Gibran). Demokrasi Indonesia mengarah pada otoritarianisme. Persekongkolan semakin menjadi antara Lembaga-lembaga pemerintahan dengan para pemimpin, seperti mengubah peraturan perundang-undangan. Perubahan UU ini menjadi senjata untuk mengintimidasi orang-orang yang kontra dengan demokrasi yang tengah berlangsung. Ini merupakan fenomena baru yang mana politik dinasti semakin gencar diciptakan oleh para elit politik. Kekuasaan seperti ini bisa menimbulkan suatu pertentangan yang merubah demokrasi yang telah dirancang sedemikian baik. Presiden Jokowi yang sejak awal memprioritaskan pembangunan ekonomi kini berhasil mengelabui rakyat. Semakin gencar pembangunan dilakukannya, semakin terpinggirkan juga hak-hak rakyat serta mengabaikan politik demokrasi, hukum dan HAM. Laporan dari organisasi hak-hak asasi manusia menunjukkan adanya penurunan dalam menghargai hak-hak sipil dan politik seperti adanya pembatasan terhadap hak untuk berekspresi dan kebebasan individu lainnya. Yang semestinya dilakukan sekarang ialah perjuangan dalam merebut kembali ruang demokrasi yang dibajak oleh elit politik.

### **C. Membaca Demokrasi Indonesia Melalui Kontrak Sosial Rousseau**

Kontrak Sosial selalu mengandaikan adanya kebebasan bagi setiap individu. Menurut Locke, manusia pada dasarnya baik secara kodrati. Jika manusia merasa aman dan damai, maka itulah keadaan alami manusia. Adanya hukum kodrat memungkinkan manusia untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan Bersama ini, manusia dapat menikmati kebebasan atas hak-haknya. Inilah yang tidak boleh direbut dari setiap individu dalam komunitas. Keberadaan komunitas dapat menjamin keberlangsungan hidup setiap orang. Rousseau menginginkan suatu kehidupan penuh kebahagiaan. Hubungan sosial dalam masyarakat hendaklah berakar dan mengalir dari kehendak dan hasrat setiap orang untuk mewujudkan diri sendiri dalam kerangka kepentingan bersama, sehingga masing-masing orang masih tetap menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan bebas seperti keadaan asalnya. Jika suatu golongan tertentu atau seorang individu melakukan suatu tindakan pelanggaran, maka sistem Kontrak Sosial yang tengah berlangsung itu mengalami kemunduran, seperti demokrasi. Masalah demokrasi selalu menjadi topik hangat di tengah masyarakat saat ini. Indonesia yang sangat kuat akan sistem demokrasinya, kini tumbang oleh suatu model berpolitik para kelas atas. Kini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Masalah dinasti politik merupakan isu yang menghiasi rezim demokrasi. Perhatian masyarakat terhadap persoalan ini masih besar karena pada kenyataannya fenomena tersebut seringkali menjadi strategi kemenangan untuk meraih kekuasaan. Sebagai pioner demokrasi, Rousseau menumbuhkan kesadaran akan kebebasan, kedamaian dan kedaulatan rakyat. Ketiga hal ini menitikberatkan pada kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir dan berperasaan. Tujuan hidup bernegara ialah agar bisa menikmati kebebasan.

Berdasarkan akar katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Demos dan Kratos. Demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Suatu sistem pemerintahan dikendalikan oleh kedaulatan rakyat. Untuk itu rakyat harus bebas dan berhak untuk hidup. Masalah kebebasan akan selalu menarik dibahas terutama dalam demokrasi seperti Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga 2018, kebebasan masyarakat dalam hidup bernegara mengalami pasang surut. Sistem politik Indonesia yang otoriter, bertumpuh pada model demokrasi yang dirancang sedemikian bagus oleh para tokoh nasional. Sejarah mencatat, Indonesia mengalami empat kali perubahan dalam penerapan konsep demokrasi, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Problem yang sering muncul terkait kebebasan di Indonesia selalu menjadi sentral karena pelakunya tidak diteruskan secara ke rana hukum. Penyebab utamanya ialah aparaturnegara sebagai pelaku utama sehingga dengan mudah menghindar dari ancaman hukum. Konsep demokrasi yang pernah terjadi, seperti mdalaasa Demokrasi Konstitusional/Parlemerter 1945-1959; Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965; Masa Demokrasi Pancasila/OrdeBaru 1965-1998, Masa Reformasi 1998-sekarang). Dari keempat penerapan ini, suasana kebebasan hanya dirasakan saat awal kemerdekaan,yaitu saat menganut sistem politik parlemen.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, demokrasi Indonesia berada di urutan 64 dari 179 negara dengan skor 6,30. Penelitian ini dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Demokrasi Indonesia saat ini masih tergolong catat. Pada tahun 2021 lalu, indeks demokrasi Indonesia di kisaran 78,12 atau berkategori sedang. Hasil ini diperparah oleh kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Hal ini secara lansung menurunkan indeks demokrasi terutama pada segi ekonomi. Indeks demokrasi Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan setelahnya, demokrasi Indonesia kembali merosot terutama pada tahun 2024.

## 1. Model Politik Otoriter

Pembahasan mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun ini begitu kontroversial. Pemilihan presiden tahun ini lebih layak disebut sebagai pesta para elit politik. Bagaimana tidak, tokoh politik menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginan sepihak. Padahal sebagai bentuk implementasi prinsip demokrasi, proses politik secara ideal harus melalui aturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini merupakan akibat dari sistem politik yang memberi peluang bagi para penguasa untuk kembali berpolitik dalam tataran elit. Berbagai jenis komentar dilontarkan oleh masyarakat dengan tujuan agar pembelotan yang terjadi selama ini bisa diperbaiki. Para elit politik bermain dengan pendasaran merebut simpati rakyat sehingga dengan mudah menjalankan rencana tanpa dihalangi oleh kebebasan rakyat. Mereka memperoleh hak keistimewaan dari penguasa dalam berpolitik. Ada slogan yang mengatakan bahwa “politik Indonesia itu cepat berganti musim.” Mengutamakan kepentingan orang tertentu menjadi suatu yang nyata terjadi melalui aksi korupsi. Kebutuhan Masyarakat dinomorduakan demi kesejahteraan pribadi. Saat ini kepercayaan publik dirusak oleh permainan para penguasa sehingga kestabilan politik mulai goyah. Lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya bertindak positif, malahan berdiri pada salah satu pihak. Sungguh! demokrasi telah runtuh dari dalam. Orang-orang yang di percayakan oleh rakyat kini membelot dan melawan demokrasi karena tidak sesuai dengan keinginan. Tindakan membunuh demokrasi dilakukan dalam rentan waktu yang ditelah di rancang baik. Pembajakan terhadap lembaga demokrasi dilakukan tanpa menghilangkan substansinya. Kini toleransi dan kebebasan rakyat tidak diberlakukan secara adil dan benar. Dimanakah kebebasan bagi rakyat Indonesia? Keseimbangan serta kebebasan yang nyata tidak diaktualisasikan dengan baik. Rousseau menginginkan kehidupan yang penuh bahagia, baik rakyat maupun pemerintah.

## 2. Demokrasi Indonesia dan Kontrak Sosial Rousseau

Demokrasi memang berkaitan dengan Kontrak Sosial yang dicetuskan Rousseau. Kontrak Sosial sebagai suatu perjanjian antara pemimpin maupun antara sesama individu dalam negara. Perjanjian ini berupa aturan atau hukum yang ditetapkan dalam negara. Pemerintah tidak bisa mengaambil keputusan sepihak atau menciptakan undang-undang yang merugikan rakyat. Rakyat harus menjadi penyusun undang-undang dalam melaksanakannya. Rousseau menganggap, tidak ada yang lebih bahaya dari pengaruh kepentingan pribadi dalam negara. Mesti adanya kepuasan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk implementasi dari Kontrak Sosial. Sebagai seorang filsuf politik, Rousseau setuju dengan demokrasi walaupun menurutnya tidak berfungsi secara baik. Keraguan Rousseau terhadap demokrasi termuat dalam dua asumsinya, terutama yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia, yaitu:

### a) Sebuah negara demokrasi harusnya kecil.

Apabila melihat luas negara Indonesia, akan sulit memang untuk melakukan pengontrolan. Rousseau berpendapat bahwa suatu negara yang luas akan mengalami kompleksitas dalam melaksanakan demokrasi. Suatu negara yang besar mengibaratkan jumlah penduduk yang banyak. faktor penduduk yang banyak ini membutuhkan pelaksanaan demokrasi yang lebih kompleks. Dengan ini, rakyat akan mudah dikontrol serta bisa saling mengenal satu sama lain. Perjuangan demokrasi membutuhkan seluruh lapisan sehingga dengan mudah dicapai.

### b) Penguasaan Kekayaan

Yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan negara. Masalah ini tidak lari jauh dari kasus korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia memang menjadi kasus yang telah merengut demokrasi dan menjadi kasus tertua. Sejauh ini negara Indonesia belum sepenuhnya serius

dalam penanganan korupsi. Masalah sosial ini pada dasarnya merupakan kejahatan yang bersifat evolutionary, yang tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring dengan laju perkembangan jaman. Tidak bisa dipungkiri, korupsi akan terus menjadi masalah yang dihadapi negara karena makin banyak teknik akan dilakukan dalam berkorupsi.

Dari kedua keraguan ini, tidak ada bentuk pemerintahan yang sangat rentan memunculkan perang sipil dan gangguan internal selain Demokrasi. Menurut Rousseau, negara yang luas lebih cocok diterapkan pemerintahan monarki. Memang fenomena inilah yang sedang terjadi di negara Indonesia. Penerapan sistem demokrasi mulai pudar dan hendak memunculkan sistem monarki dalam negara. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dari segi demokrasi terutama dalam dunia politik.

## **KESIMPULAN**

Rakyat utama saat ini kini datang dari kalangan para elit politik. Ada usaha untuk meraup keuntungan dengan mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang melarat. Selain itu, kekuasaan kini menjadi media untuk melanggengkan segala pertentangan. Perubahan undang-undang dilakukan tanpa persetujuan dari rakyat. Dimanakan demokrasi yang diidamkan? Kontrak Sosial yang dikonsepsikan oleh Rousseau rupanya tidak begitu optimal diterapkan di Indonesia. Rupanya demokrasi tidak mengikat pemerintah dengan rakyat. Kini semakin menegangkan; suara atau keluhan rakyat yang seharusnya direspon malah diabaikan. Kini negara Indonesia tercinta terbelenggu oleh kepentingan sepihak. Hak-hak rakyat kini dibatasi. Konsep “Hidup bersama” hanya sebuah slogan yang memberi jalan bagi para koruptor untuk beraksi. Esensi demokrasi semakin memudar akibat dari penerapan undang-undang yang hanya dibuat sepihak. Demokrasi seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Namun apa yang terjadi? Kini negara dihadapkan dengan tantangan serius akibat kekuasaan yang salah diartikan. Penyebab lainnya ialah tumbuhnya kembali kekuasaan yang otoriter. Para penguasa beranggapan bahwa kekuasaan terhadap rakyat adalah ajang untuk meraup keuntungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Rousseau, Jean Jarques. Kontrak Sosial. 1986.

Samadhi, Willy Purnama dan Nicolas Warouw, ed. Demokrasi di Atas Pasir. Terj. Debbie Prabawati dkk. Jakarta, 2009.

Prijo Djatmiko, Wahyu. Politik Kriminal Pemberantasan Tidakan Korupsi; Perspektif Budaya Hukum. Jogja: Penerbit Thafa Media, 2020.

Basyaib, Hamid, Membela Kebebasan; Percakapan Tentang Demokrasi Liberal. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006

### **Jurnal**

Alah, Zikraini. “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau”. PARADIGMA: Jurnal Kalam dan Filsafat, vol. 1:1, September 2019.

Piter, Romanus dan Valentinus Saeng. “Konsep Kebebasan Menurut Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia”. Jurnal Filsafatdan Teologi, 50:1, 2021.

Pesurnay, Althien J.. “Kontrak Sosial Menurut Emmanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia” Jurnal Filsafat, 31:2, Agustus 2021.

Negri Wijaya, Daya “Kontrak Sosial Menurut Thommas Hobbes dan John Locke”. Jurnal Pendidikan Sosiologi Humanis, 1;2, Desember 2016.